

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TUGAS AKHIR

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



AYUDA SARI

NIM. B1011211148

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ayuda Sari
NIM : B1011211148
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 16 Juni 2025

Ayuda Sari
NIM. B1011211148

PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ayuda Sari
NIM : B1011211148
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 16 Juni 2025

Ayuda Sari
NIM. B1011211148

LEMBAR PENGESAHAN YURIDIS

LEMBAR YURIDIS

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Tyud

Ayuda Sari

B10111211148

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 21 Mei 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Jumhur, S.E., M.Si.	3/06/2025	<i>Jumhur</i>
		NIP 196709281997021001		
2.	Ketua Penguji	Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si.	28-05-2025	<i>Akhmad Yani</i>
		NIP 196212291988101001		
3.	Anggota Penguji	Yanto, S.E., M.Sc.	21/06/2025	<i>Yanto</i>
		NIP 197706152003121004		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan kasih kurinia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini. Shalawat beserta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas Akhir ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tanjungpura. Adapun judul Tugas Akhir ini adalah **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu, membimbing, mendukung dan memberikan saran, masukan dan doa. Dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini bisa diselesaikan dengan lancar.
5. Bapak Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si. selaku dosen penguji pertama yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku dosen penguji kedua yang juga telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, pelajaran serta pengalaman selama dimasa perkuliahan kepada penulis terkhusus dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan.
8. Seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, Perpustakaan dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini.
9. Kepada Ibu saya yang saya cintai, Ibu Aida Sulastry yang telah mengorbankan semuanya untuk penulis sekaligus menjadi ayah bagi penulis dan adik-adik dirumah. Terima kasih karena sudah menjadi wonder woman bagi penulis memberikan kesempatan untuk penulis agar dapat melanjutkan pendidikan hingga telah mencapai tahap ini. Terima kasih atas semua dukungan yang diberikan, semua doa, kasih sayang, semangat dan kesabaran dalam mendukung penulis untuk berproses selama menempuh pendidikan ini.
10. Kepada almarhum nenek-nenek kesayangan ku, yang selalu mendukung setiap langkah si penulis dan tidak pernah lepas dalam doa mereka mengenai kesuksesan si penulis.

11. Kepada bibi kesayangan, Bunda Wita Oktafiani terima kasih atas dukungan dan doa bagi penulis.
12. Adik tercinta saya Asri Febriani, Septi Aulianti, Zulkifli dan Safa Zuhaira terima kasih telah menjadi teman di rumah dan dukungan bagi penulis dengan segala kelakuan dan tingkah lakunya.
12. Kepada abang kakak besty si penulis, abang Iqbal dan kakak Nurul terima kasih juga atas bantuan, masukan, motivasi, dukungan dan doanya selama ini tanpa kalian si penulis mungkin tidak bisa selesai secepat ini.
13. Sahabat pejuang sarjana yang tercinta, terkasih dan tersayang dari mahasiswa baru di bangku perkuliahan hingga saat ini. Nur Khikmah yang sudah saya anggap sebagai kakak pertama, yang beda 2 tahun. Terima kasih karena sudah mewarnai dan sudah mau kebersamaian dalam berproses selama ini. Terima kasih atas semua bantuan serta sudah menjadi tempat untuk pulang, menghibur dikala sedih dan berkeluh kesah.
14. Sahabat pejuang sarjana yang tercinta, terkasih dan tersayang dari mahasiswa baru di bangku perkuliahan hingga saat ini. Sukmawati yang sudah saya anggap sebagai kakak kedua saya walupun tahun kelahiran kita beda 1 tahun. Terima kasih karena sudah mewarnai dan sudah mau kebersamaian dalam berproses selama ini. Terima kasih atas semua bantuan serta sudah menjadi tempat untuk pulang, menghibur dikala sedih dan berkeluh kesah.
15. Sahabat-sahabat pejuang serjana lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih atas bantuannya dan kebaikannya selama ini.
16. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua doa, kebaikan, dukungan dan motivasinya selama ini.
17. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih karena sudah bisa bertahan dan berjuang sampai detik ini sehingga mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima kasih karena sudah mau berproses dalam perjalanan yang panjang, semoga diri ini bisa bertahan kembali untuk masa depan dan berjuang lebih keras lagi untuk memperjuangkan tujuan yang telah dibuat sehingga bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang-orang disekitar.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun yang bertujuan untuk perbaikan tugas akhir ini agar lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, 16 Juni 2025

Ayuda Sari

NIM. B1011211148

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk penelitian ini deskriptif-kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Berbentuk data panel yaitu gabungan dari data *cross section*, 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2019 sampai 2023. Metode yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda dengan bantuan *views 13*, dengan model paling tepat dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah dan upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat .

Kata kunci: Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Ayuda Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah pengangguran. Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dan angkatan kerja menjadi penyebab utama pengangguran (Muslim, 2014). Seseorang dikategorikan sebagai pengangguran apabila masuk dalam angkatan kerja tetapi belum memperoleh pekerjaan (Sukirno, 2016). Peningkatan pengangguran umumnya terjadi akibat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diiringi oleh penciptaan lapangan kerja (Wardiansyah *et al.*, 2017). Tingkat pengangguran yang tinggi juga menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang belum optimal (Febrianti *et al.*, 2021). Pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: pengangguran terbuka (tidak memiliki pekerjaan sama sekali), pengangguran terselubung (jumlah tenaga kerja melebihi kebutuhan sehingga produktivitas tidak maksimal), dan setengah menganggur (bekerja tidak optimal atau di bawah 35 jam per minggu) (Zusen & Setyowati, 2022). Salah satu indikator untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana persentase yang dianggap wajar adalah sekitar 4% (Filiarsari & Setiawan, 2021). TPT mencerminkan jumlah individu yang benar-benar tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Jhing, 2014).

Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki luas wilayah 147.307 km² dan populasi terus meningkat dari 5,47 juta jiwa pada 2019 menjadi 5,62 juta jiwa pada 2023, turut mengalami permasalahan pengangguran. Peningkatan penduduk yang tidak diiringi oleh penciptaan lapangan kerja menyebabkan peningkatan TPT. Pada tahun 2020, TPT meningkat tajam akibat pandemi COVID-19 yang memicu PHK massal dan pembatasan aktivitas ekonomi. Meskipun pada tahun 2021 pengangguran masih tinggi, situasi mulai membaik pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan pemerintah (Lestari, 2023). TPT di Kalimantan Barat menunjukkan fluktuasi antar daerah. Kota Pontianak dan Singkawang mencatat TPT tertinggi, sementara kabupaten seperti Sekadau dan Kapuas Hulu menunjukkan TPT lebih rendah. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat juga menunjukkan disparitas. Kota Pontianak memiliki lama sekolah tertinggi, stabil di atas 10 tahun, sedangkan Kabupaten Kayong Utara memiliki angka terendah, meski mengalami peningkatan. Pendidikan sebagai bagian dari investasi sumber

daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas (Muslim, 2014).

TPAK di Kalimantan Barat berkisar antara 68–69%, dengan Kapuas Hulu dan Sekadau mencatat partisipasi tertinggi, sedangkan Pontianak dan Singkawang cenderung lebih rendah. TPAK dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial di masing-masing daerah. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menunjukkan tren kenaikan dari 2019 hingga 2023. Kabupaten Ketapang memiliki UMK tertinggi, sedangkan Sekadau terendah. Perbedaan UMK mencerminkan variasi biaya hidup dan kondisi ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan fluktuasi selama 2019–2023. Pandemi menyebabkan penurunan tajam pada 2020, diikuti pemulihan bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Daerah yang mengandalkan sektor industri dan sumber daya alam menunjukkan pertumbuhan yang lebih fluktuatif dibanding daerah berbasis jasa seperti Pontianak. Secara keseluruhan, berbagai indikator seperti TPT, RLS, TPAK, UMK, dan PDRB menggambarkan dinamika ketenagakerjaan di Kalimantan Barat. Analisis terhadap faktor-faktor ini penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Permasalahan

Pengangguran Terbuka merupakan mereka yang benar-benar sedang tidak bekerja baik itu secara sukarela maupun karena keterpaksaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka masih terbilang tinggi untuk di beberapa Kabupaten/Kotanya. Namun untuk variable-variabel seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah ini tentunya belum sepenuhnya dipahami. Dengan mempertimbangkan periode waktu dari tahun 2019 hingga 2023, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan studi empiris. Maka dari itu pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh TPAK terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan kuantitatif, fokus mencari hubungan asosiatif kausal antara kedua variabel atau lebih. Tempat yang digunakan dalam penelitian adalah empat belas di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan tahun penelitian 2019 - 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sumber data melibatkan penggunaan data yang sudah ada dari sumber tepercaya seperti data sensus atau Badan Pusat Statistik Indonesia, data pemerintah dan Lembaga penelitian lainnya. Metode yang diterapkan adalah regresi linear berganda, model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel. Dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun alat atau aplikasi yang digunakan untuk menguji data yaitu menggunakan Eviews 13.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terbaik. Adapun variabel rata-rata lama sekolah (RLS) ditemukan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, sementara variabel upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dan variable pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

6. Kesimpulan dan Saran

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap TPT di Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun rata-rata lama sekolah meningkat, belum tentu hal tersebut berdampak secara langsung terhadap penurunan pengangguran apabila tidak disertai dengan kualitas pendidikan yang relevan dan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang diperoleh selama pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja (*skill mismatch*). Kedua, fenomena educated unemployment juga mungkin terjadi, di mana individu dengan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Ketiga, keterbatasan dalam ketersediaan lapangan kerja formal menyebabkan peningkatan pendidikan tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT di Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun jumlah tenaga kerja yang tersedia meningkat (ditunjukkan dengan naiknya TPAK), tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak mengalami peningkatan yang sepadan. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan ketidaksignifikan pengaruh ini antara lain adalah struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor informal, terbatasnya pertumbuhan investasi dan industri

penyerap tenaga kerja, serta rendahnya daya beli masyarakat yang menghambat pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja baru.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap TPT di Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun tidak signifikan, dapat mencerminkan kondisi di mana kenaikan upah minimum menyebabkan sebagian pelaku usaha mengurangi jumlah tenaga kerja atau menunda perekrutan baru, sebagai bentuk penyesuaian terhadap meningkatnya biaya produksi. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa adanya faktor-faktor tertentu seperti kebijakan UMK di Kalimantan Barat belum memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat pengangguran terbuka secara agregat. Bisa jadi karena besaran UMK belum menjadi faktor utama dalam keputusan perekrutan tenaga kerja, atau karena sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal yang tidak terikat langsung dengan kebijakan upah minimum.
4. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT di Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nyata dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Meskipun rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat, belum tentu hal tersebut berdampak secara langsung terhadap penurunan pengangguran apabila tidak disertai dengan kualitas pendidikan yang relevan dan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu pemerintah perlu memperkuat kualitas pendidikan, khususnya dengan memperhatikan relevansi kurikulum pendidikan terhadap kebutuhan dunia kerja.
2. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat, hal tersebut tidak otomatis mengurangi tingkat pengangguran jika tidak diiringi penciptaan lapangan kerja formal. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal dan berkelanjutan.
3. Dalam mengatasi masalah Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) tersebut, maka disarankan agar kebijakan kenaikan UMK disertai dengan strategi peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasional serta pemberian insentif kepada sektor usaha yang padat karya, sehingga dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penetapan UMK didasarkan pada kondisi ekonomi lokal dan produktivitas, agar dampaknya lebih efektif terhadap penciptaan lapangan kerja.
4. Mengingat pertumbuhan ekonomi memiliki dampak signifikan dalam menurunkan TPT, maka strategi pembangunan perlu difokuskan pada pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan infrastruktur ekonomi dan meningkatkan iklim investasi. Strategi ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata dan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	i
PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN YURIDIS.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
1. PENDAHULUAN	2
2. KAJIAN LITERATUR.....	9
2.1 Tinjauan Teori	9
2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	9
2.1.2 Pendidikan.....	10
2.1.3 Penduduk.....	10
2.1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota	11
2.2 Hubungan Antar Variabel Penelitian	12
2.2.1 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap TPT	12
2.2.2 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	12
2.2.3 Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	13
2.2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka ..	13
2.3 Tinjauan Empiris	13
2.4 Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian	14
2.4.1 Kerangka Konseptual	14
2.4.2 Hipotesis Penelitian	15
3.METODE PENELITIAN	15
3.1 Uji Penentuan Model.....	18
3.2 Uji Statistik	19
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Hasil Penelitian	20
4.1.1 Uji Penentuan Model Regresi Data Panel.....	20
4.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda	20
4.1.3 Hasil Uji Statistik	21
4.2 Pembahasan Penelitian	23
4.2.1 Pengaruh Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.	23
4.2.2 Pengaruh Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.	24
4.2.4 Pengaruh Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.	26
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	27
DAFTAR RUJUKAN	28
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.....	4
Tabel 2 Rata-Rata Lama Sekolah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023	5
Tabel 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023	6
Tabel 4 Upah Minimum 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.....	7
Tabel 5 PDRB Harga Konstan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023	8
Tabel 6 Definisi Operasional Variabel.....	15
Tabel 7 Hasil Uji Model Regresi.....	20
Tabel 8 Hasil Uji Regresi Berganda dengan Fixed Effect Model	20
Tabel 9 Hasil Uji t-statistik.....	21
Tabel 10 Hasil Uji F-statistik	22
Tabel 11 Hasil Uji R^2 (Koefisien determinan).....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat	3
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	15

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

¹Ayuda Sari

Universitas Tanjungpura, Indonesia

²Dr. Jumhur, S.E., M.Si.

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of average length of schooling (RLS), labor force participation rate (TPAK), district/city minimum wage (UMK) and economic growth on the open unemployment rate in West Kalimantan Province. This research is descriptive-quantitative, using secondary data obtained from publications of the Central Statistics Agency (BPS) and the Manpower and Transmigration Office of West Kalimantan Province. In the form of panel data, namely a combination of cross-section data, 14 regencies/cities in West Kalimantan Province and time series data from 2019 to 2023. The method used is multiple linear regression test with the help of eviews 13, with the most appropriate model in this study being the Fixed Effect Model (FEM). The results of the study show that the variables of average length of schooling and district/city minimum wage have a positive but insignificant effect on the open unemployment rate in the regencies/cities of West Kalimantan Province, the labor force participation rate has a negative and insignificant effect on the open unemployment rate in the regencies/cities of West Kalimantan Province, and the economic growth variable has a negative and significant effect on the open unemployment rate in the regencies/cities of Kalimantan Province.

Keywords: *Average Length of Schooling, Labor Force Participation Rate, District/City Minimum Wage, Economic Growth, Open Unemployment Rate.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk penelitian ini deskriptif-kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Berbentuk data panel yaitu gabungan dari data *cross section*, 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2019 sampai 2023. Metode yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda dengan bantuan *eviews 13*, dengan model paling tepat dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah dan upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat .

Kata kunci: Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka

1 PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia dikategorikan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dimana salah satu permasalahan yang dialami negara berkembang seperti Indonesia, adalah pengangguran (Muslim, 2014). Ketidaksesuaian antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja merupakan akar permasalahan pengangguran. Apabila seseorang dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum memperolehnya maka dia disebut pengangguran (Sukirno, 2016). Meningkatnya angka pengangguran disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan penciptaan kesempatan kerja (Wardiansyah *et al.*, 2017). Menurut Sukirno, pengangguran adalah suatu parameter pembangunan ekonomi, apabila tingkat pengangguran rendah, maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi di negara tersebut berhasil (Febrianti *et al.*, 2021). Pengangguran umumnya dikelompokkan menjadi tiga jenis menurut kondisi yang menjadi pemicunya (Pantjar Simatupang dalam wijayanto, 2010):

1. Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan seseorang baru lulus sekolah atau orang yang pindah dari pekerjaan lama dan masih dalam proses mencari pekerjaan yang baru.
2. Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Pengangguran Konjungtur, yaitu pengangguran yang terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi atau karena permintaan barang dan jasa yang menurun, sehingga Perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) (Ardian *et al.*, 2022).

Menurut Marius (2004) menyatakan bahwa pengangguran dalam banyak hal diartikan sebagai tenaga kerja yang belum bekerja atau bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian tersebut pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*). Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena ada individu yang tidak memiliki pekerjaan padahal sudah berusaha dengan maksimal dan ada pula yang malas mencari pekerjaan yang layak atau malas bekerja.
2. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*) Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak dalam suatu unit kerja meskipun pengurangan tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung dapat terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sehingga akhirnya bekerja secara suboptimal.
3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*). Setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu (zusen & Setyowati, 2022).

Untuk melihat seberapa parah masalah pengangguran ini, maka yang menjadi parameter yang dilihat adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Kisaran tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat dikatakan wajar jika persentasenya berada pada kisaran 4% (Filiyasi & Setiawan, 2021). Menurut Edgar Edwards, pengangguran terbuka merupakan mereka yang benar-benar sedang tidak bekerja baik itu secara sukarela ataupun karena keterpaksaan dan sedang aktif dalam mencari pekerjaan (Jhingan, 2014:359). Masalah pengangguran ini hampir terdapat di seluruh kepulauan Indonesia,

dan salah satunya Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat merupakan Provinsi dengan luas wilayah terbesar keempat di Indonesia, yakni mencapai 147.307 km². Dimana jumlah penduduk di setiap tahunnya terus meningkat, terbukti pada tahun 2019 penduduk di Kalimantan Barat mencapai 5.470.797 jiwa, dan terus meningkat hingga di tahun 2023. mencapai 5.623.328 jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi dapat meningkatkan angka dari angkatan kerja potensial, namun pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat tanpa disertai penciptaan lapangan kerja yang cukup dapat menyebabkan tingkat pengangguran meningkat.

Gambar 1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat



Tahun 2019-2023

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2023)

Pada kurva 1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2019 hingga 2023 bervariasi, yang dimana pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,46% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Dimana kenaikan ini diakibatkan oleh banyaknya PHK, adanya aturan tentang lock down, PSBB dan social distancing pada masa pandemic Covid-19 menyerang Indonesia sejak 2 Maret 2020 (Fahri *et al.*, 2020). Sehingga mengakibatkan lonjakan pada tingkat pengangguran terbuka di seluruh Provinsi yang ada di Negara Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Peristiwa ini tentunya berlanjut hingga tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar 1%, dimana pada tahun tersebut memasuki era new normal, Achmad Yurianto menjelaskan bahwa masyarakat harus tetap menjaga produktivitas di tengah pandemi dengan tatanan baru yang disebut new normal (Videlia, 2020).

Di era ini tentunya masih dengan tingkat penganggurannya dari tahun 2020. Pada tahun 2022 dan 2023 tingkat pengangguran mengalami penurunan hingga 0,77 %, hal ini dikarenakan suksesnya kebijakan pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka pasca pandemic di Indonesia (Lestari, 2023). Sukirno (2006) juga menyebutkan di dalam bukunya, bahwa terdapat beberapa dari tujuan kebijakan pemerintah guna mengatasi permasalahan pengangguran, yang dimana tujuan tersebut dibedakan menjadi tujuan yang bersifat ekonomi, tujuan yang bersifat sosial dan politik.

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Di 14 Kabupaten/Kota Provinsi

NO	Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sambas	3,48	3,71	3,97	5,08	5,04
2	Bengkayang	2,66	3,91	4,42	2,84	2,92
3	Landak	2,69	3,38	3,22	1,78	2,24
4	Mempawah	5,11	7,55	7,71	7,48	7,33
5	Sanggau	3	3,52	3,45	3,76	3,86
6	Ketapang	4,39	7,3	6,94	6,71	6,57
7	Sintang	3,1	4,5	3,95	2,97	2,92
8	Kapuas Hulu	2,43	4,02	4,18	2,21	2,19
9	Sekadau	3,04	3,39	2,92	1,33	2,29
10	Melawi	2,39	2,7	2,66	1,95	2,46
11	Kayong Utara	3,89	3,71	3,78	3,1	3,04
12	Kubu Raya	5,5	7,14	7,02	6,87	6,76
13	Kota Pontianak	9,06	12,36	12,38	9,92	8,92
14	Kota Singkawang	6,31	8,78	9,16	8,63	8,51
Kalimantan Barat		4,35	5,81	5,82	5,11	5,05

Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2023)

Berdasarkan tabel 1 memperlihatkan kondisi pengangguran di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. TPT tercatat sebesar 4,86% pada tahun 2019, meningkat menjadi 5,81% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 5,05% pada tahun 2023. Kota Pontianak dan Kota Singkawang mencatatkan TPT tertinggi di antara wilayah lainnya, dengan Pontianak mencapai 12,38% pada 2021 sebelum menurun menjadi 8,92% pada 2023. Sebaliknya, kabupaten seperti Kapuas Hulu dan Sekadau menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih rendah, di mana Sekadau sempat mencapai angka terendah sebesar 1,33% pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, data menunjukkan variasi dalam tingkat pengangguran di berbagai Kabupaten/Kota, dengan beberapa daerah mengalami peningkatan signifikan sementara yang lain menunjukkan penurunan atau stabilitas. Kota Pontianak dan Kota Singkawang memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Alasan terjadinya ketimpangan tingkat pengangguran terbuka antara Kabupaten/Kota ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka tersebut. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka antara lain tingkat pendidikan, TPAK, upah dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2 Rata-Rata Lama Sekolah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab/Kota (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sambas	6,7	6,71	6,72	6,74	6,75
2	Bengkayang	6,53	6,76	6,8	7	7,22
3	Landak	7,1	7,11	7,12	7,15	7,24
4	Mempawah	6,82	7,03	7,04	7,17	7,2
5	Sanggau	6,95	7,15	7,39	7,41	7,44
6	Ketapang	7,26	7,31	7,46	7,48	7,55
7	Sintang	6,89	7,07	7,08	7,36	7,64
8	Kapuas Hulu	7,47	7,52	7,53	7,59	7,82
9	Sekadau	6,6	6,83	6,85	7,12	7,13
10	Melawi	6,67	6,76	6,91	7,18	7,42
11	Kayong Utara	6	6,01	6,02	6,21	6,35
12	Kubu Raya	6,82	6,83	7	7,02	7,04
13	Kota Pontianak	10,14	10,17	10,43	10,44	10,45
14	Kota Singkawang	7,72	7,89	7,9	8,19	8,21
Kalimantan Barat		7,31	7,37	7,45	7,59	7,71

Tahun 2019-2023

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2023)

Berdasarkan tabel 2 terlihat data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, dimana dari tabel tersebut diperlihatkan bahwa Kota Pontianak memiliki Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi di antara semua Kabupaten/Kota, dengan angka yang stabil di atas 10 tahun selama periode tersebut, mencapai 10,45 tahun pada 2023. Kota Singkawang juga menunjukkan angka yang relatif tinggi, meningkat dari 7,72 tahun pada 2019 menjadi 8,21 tahun pada 2023. Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 7,47 tahun pada 2019 menjadi 7,82 tahun pada 2023 dan Kabupaten Kayong Utara memiliki Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terendah, meskipun ada peningkatan dari 6 tahun pada 2019 menjadi 6,35 tahun pada 2023. Secara umum tabel tersebut menunjukkan adanya disparitas dalam rata-rata lama sekolah antar Kabupaten/Kota, dengan Kota-Kota besar seperti Pontianak dan Singkawang memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Idris (2007) menyatakan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bisa melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Atau dengan kata lain, tujuan akhir dari program pendidikan itu sendiri adalah tercapainya kesempatan kerja yang diharapkan. Setidaknya masyarakat yang telah menempuh pendidikan, setelah selesainya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih berkelas di sektor formal. Pendidikan ini termasuk dalam salah satu investasi di bidang sumber daya manusia yang biasanya dikenal Human Capital (teori modal manusia). Investasi terhadap pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dinilai sebagai human stock, dimana nilai tersebut setelah menjalani pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan maka diharapkan akan mengalami peningkatan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan pendapatan individu, peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai rasional (manfaat sosial) individu jika dibandingkan dengan sebelum menempuh pendidikan (Muslim, 2014).

Tabel 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 14 Kabupaten/Kota Provinsi

No	Kab/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sambas	71,76	74,28	72,84	74,12	72,72
2	Bengkayang	73,47	75,81	70,16	69,95	72,93
3	Landak	68,74	71,78	70,19	72,29	71,13
4	Mempawah	63,12	64,14	60,86	63,31	68,27
5	Sanggau	69,18	70,38	69,41	70,27	70,31
6	Ketapang	65,53	60,75	64,44	60,57	66,48
7	Sintang	72,01	75,57	77,78	73,14	74,12
8	Kapuas Hulu	77,22	74,09	72,35	77,68	72,28
9	Sekadau	77,38	77,53	71,98	74,31	73,77
10	Melawi	74,57	73,93	72,31	74,41	73,73
11	Kayong Utara	66,43	65,53	65,53	70,02	72,54
12	Kubu Raya	64,86	67,71	67,47	64,66	65,28
13	Kota Pontianak	61,75	60,05	61,94	64,82	63,47
14	Kota Singkawang	67,04	63,84	64,31	68,86	66,6
Kalimantan Barat		68,51	68,83	68,45	68,97	69,42

Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2023)

Berdasarkan tabel 3 secara umum TPAK di Kalimantan Barat menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, rata-rata TPAK di provinsi ini cenderung stabil di sekitar angka 68-69%. Yang diamana Kabupaten/Kota dengan TPAK Tertinggi berada pada Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau kedua daerah tersebut seringkali memiliki TPAK yang tinggi. Misalnya, pada tahun 2019, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki TPAK sebesar 77,22% dan Kabupaten Sekadau sebesar 77,38%. Kabupaten/Kota dengan TPAK Terendah berada di Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang cenderung memiliki TPAK lebih rendah dibandingkan daerah lain. Pada tahun 2019, Kota Pontianak memiliki TPAK sebesar 61,75%. Selaian itu ada beberapa daerah menunjukkan perubahan signifikan dalam TPAK dari tahun ke tahun. Misalnya, Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari 60,86% pada tahun 2021 menjadi 68,27% pada tahun 2023 dan beberapa daerah seperti Kabupaten Sanggau serta Kabupaten Melawi yang menunjukkan stabilitas dalam TPAK mereka, dengan sedikit perubahan dari tahun ke tahun. dinamika mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Barat ini, tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial di masing-masing daerah.

Tabel 4 Upah Minimum 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

NO	Kab/Kota	UMK Kalimantan Barat/Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sambas	2.377.000	2.580.000	2.600.000	2.609.398,78	2.792.599
2	Bengkayang	2.364.777	2.566.019	2.566.019	2.586.291	2.767.564
3	Landak	2.349.870	2.549.844	2.579.844	2.582.000	2.767,31
4	Mempawah	2.232.600	2.422.594,26	2.422.594,26	2.437.279,99	2.608.601
5	Sanggau	2.318.000	2.515.262	2.515.262	2.547.405,69	2.703.536
6	Ketapang	2.636.000	2.860.323,60	2.860.323,60	2.876.252,79	3.085.615
7	Sintang	2.393.000	2.596.644,3	2.596.644,30	2.611.966,41	2.771.035
8	Kapuas Hulu	2.381.700	2.483.000	2.483.000	2.486.796,40	2.661.842
9	Sekadau	2.267.970	2.461.000	2.461.000	2.486.031,14	2.654.770
10	Melawi	2.288.306	2.483.040	2.483.040	2.515.896,49	2.682.398
11	Kayong Utara	2.501.850	2.714.750	2.714.750	2.748.507,34	2.930.678
12	Kubu Raya	2.242.000	2.433.000	2.433.000	2.467.630	2.646.878
13	Kota Pontianak	2.318.000	2.515.000	2.515.000	2.579.616,01	2.750.644
14	Kota Singkawang	2.338.840	2.537.875	2.537.875	2.596.120,45	2.781.898
Kalimantan Barat		2.211.500	2.399.699	2.399.699	2.434.328	2.608.601

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (2023)

Secara umum dari tabel 4 tersebut menunjukkan adanya tren kenaikan UMK di semua Kabupaten/Kota dari tahun 2019 hingga 2023. Misalnya, UMK di Kabupaten Sambas meningkat dari Rp2.377.000 pada tahun 2019 menjadi Rp2.792.599 pada tahun 2023. Kabupaten Ketapang memiliki UMK tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp3.085.615, sedangkan Kabupaten Sekadau memiliki UMK terendah pada tahun yang sama sebesar Rp2.654.770. Dari beberapa kabupaten/kota menunjukkan konsistensi dalam kenaikan UMK setiap tahunnya. Sebagaimana yang bisa dilihat, Kota Pontianak mengalami kenaikan dari Rp2.318.000 pada tahun 2019 menjadi Rp2.750.644 pada tahun 2023. Selain itu terdapat variasi yang cukup signifikan dalam UMK antar kabupaten/kota. Misalnya, perbedaan antara UMK tertinggi di Kabupaten Ketapang dan terendah di Kabupaten Sekadau pada tahun 2023 adalah sekitar Rp430.845. Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan yang konsisten dalam UMK di Kalimantan Barat, terdapat variasi yang signifikan antar daerah, yang mungkin mencerminkan perbedaan dalam biaya hidup dan kondisi ekonomi lokal.

No	Kab/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sambas	4,75	-2,04	4,37	4,64	4,69
2	Bengkayang	5,14	-1,99	4,33	5,45	4,68
3	Landak	4,88	-0,71	4,88	4,64	4,39
4	Mempawah	5,78	0,18	4,1	4,7	5,09
5	Sanggau	3,73	0,71	4,19	4,61	2,04
6	Ketapang	6,58	-0,49	5,23	5,42	1,1
7	Sintang	4,99	-2,19	3,8	4,96	4,68
8	Kapuas Hulu	3,8	-2,43	4,43	4,51	4,62
9	Sekadau	5,44	-0,98	4,31	5,1	4,69
10	Melawi	4,41	-1,11	4,54	4,9	4,56
11	Kayong Utara	4,97	-0,76	4,6	5,03	4,48
12	Kubu Raya	5,68	-2,39	5,18	5,48	4,98
13	Kota Pontianak	4,02	-3,96	4,61	4,97	4,76
14	Kota Singkawang	4,41	-2,51	4,82	4,97	5,06

Tabel 5 PDRB Harga Konstan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2023)

Menurut Todaro (2014:67), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total dari seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian pada tingkat daerah (Laksamana, 2016). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka jumlah nilai tambah dari barang dan jasa pada seluruh unit ekonomi di suatu daerah juga akan meningkat. Peningkatan dari jumlah barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pula (Silaban *et al.*, 2020).

Tabel 5 menunjukkan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2019 hingga 2023, yang dipecah berdasarkan Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota memiliki persentase pertumbuhan yang berbeda-beda setiap tahunnya dan menunjukkan fluktuasi ekonomi di masing-masing daerah selama periode tersebut, Secara umum, sebelum pandemi COVID-19 pada 2019, semua Kabupaten/Kota mencatat pertumbuhan ekonomi positif, dengan tingkat tertinggi dicapai oleh Kabupaten Ketapang (6,58%) dan terendah di Kabupaten Sanggau (3,73%). Pandemi pada 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian, ditunjukkan oleh penurunan tajam di hampir semua daerah. Kota Pontianak mengalami penurunan terbesar (-3,96%), diikuti oleh Kota Singkawang (-2,51%) dan Kabupaten Kapuas Hulu (-2,43%). Namun, Kabupaten Mempawah menunjukkan resiliensi relatif dengan pertumbuhan positif kecil (0,18%). Pada tahun 2021, perekonomian mulai pulih. Semua daerah kembali mencatat pertumbuhan positif, dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya mengalami percepatan

signifikan (5,23% dan 5,18%). Pemulihan ini berlanjut hingga 2022 dan 2023, meskipun dengan laju yang berbeda di setiap wilayah. Misalnya, Kabupaten Kubu Raya menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi pada 2022 (5,48%), sementara Kabupaten Ketapang mengalami perlambatan drastis pada 2023 (1,1%). Kota Singkawang berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan hingga mencapai 5,06% pada 2023. Perbedaan tingkat pertumbuhan di antara daerah-daerah ini mencerminkan variasi dalam struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya lokal. Daerah seperti Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya yang bergantung pada sektor industri dan sumber daya alam menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih berfluktuasi dibandingkan daerah yang lebih berorientasi pada sektor jasa seperti Kota Pontianak.

Selain itu, dengan tabel ini juga dapat digunakan untuk menganalisis tren ekonomi dan identifikasi sektor-sektor yang memerlukan perhatian lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang di masa depan. Dengan memahami kontribusi masing-masing sektor, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan PDRB dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

2 KAJIAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu atau tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai (Sukirno, 2008). Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian. Sebab dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan menurun sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pengangguran adalah seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dan ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Mahdar, 2015). Menurut Marius (2004) menyatakan bahwa pengangguran dalam banyak hal diartikan sebagai tenaga kerja yang belum bekerja atau bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian tersebut pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*). Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena ada individu yang tidak memiliki pekerjaan padahal sudah berusaha dengan maksimal dan ada pula yang malas mencari pekerjaan yang layak atau malas bekerja.
2. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*) Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak dalam suatu unit kerja meskipun pengurangan tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung dapat terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sehingga akhirnya bekerja secara suboptimal.
3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*). Setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja terselubung ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau kurang dari 7 jam per hari. Misalnya seorang kuli bangunan yang telah selesai mengerjakan suatu